



Pandangan Masyarakat Minahasa terhadap Pemilu Demokrasi Politik Tahun 2024

Eunice Dwi Evania¹, Romi Mesra²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan hukum, Universitas Negeri Manado

Email: ¹20606010@unima.ac.id, ²romimesra@unima.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 12, 2025

Accepted December 20, 2025

Published January 30, 2026

Kata Kunci: Masyarakat Minahasa, Pemilu 2024, Demokrasi Politik



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan masyarakat Minahasa terhadap pelaksanaan pemilu demokrasi politik tahun 2024, mencakup persepsi, dampak sosial, serta harapan masyarakat terhadap kualitas demokrasi ke depan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara mendalam kepada tiga informan yang dipilih secara purposif di wilayah Minahasa, Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Minahasa memiliki pandangan yang beragam namun cenderung positif terhadap Pemilu 2024, dengan antusiasme partisipasi yang tinggi dalam berbagai kegiatan elektoral. Namun demikian, polarisasi politik akibat perbedaan pilihan partai ditemukan telah memicu ketegangan sosial hingga ke dalam hubungan keluarga. Nilai kearifan lokal Mapalus terbukti berperan sebagai penyangga kohesi sosial masyarakat. Masyarakat Minahasa mengharapkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan pemimpin terpilih yang benar-benar berkomitmen terhadap kepentingan rakyat.

Abstract

This study aims to examine the views of the Minahasa community regarding the implementation of the 2024 democratic political elections, including perceptions, social impacts, and community expectations regarding the quality of democracy in the future. The study used a qualitative approach with data collection techniques through direct observation and in-depth interviews with three informants selected purposively in the Minahasa region, North Sulawesi. The results show that the Minahasa community has diverse but tend to be positive views regarding the 2024 elections, with high enthusiasm for participation in various electoral activities. However, political polarization due to differences in party preferences has been found to have triggered social tensions, even within family relationships. The value of local wisdom Mapalus has been proven to play a role in supporting social cohesion in the community. The Minahasa community hopes for honest and fair elections and elected leaders who are truly committed to the interests of the people.

Keywords: Minahasa Community, 2024 Election, Political Democracy

1. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan instrumen fundamental dalam sistem demokrasi yang memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara. Pemilu 2024 di Indonesia menjadi momentum penting karena dilaksanakan secara serentak, mencakup pemilihan presiden, anggota legislatif, serta kepala daerah di berbagai wilayah, termasuk Sulawesi Utara. Menurut Budiardjo (2021), demokrasi yang sehat membutuhkan

partisipasi aktif warga negara dalam setiap tahapan proses elektoral, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara. Partisipasi politik yang tinggi menjadi cerminan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menentukan masa depan bangsa melalui jalur konstitusional yang sah dan demokratis.

Masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara dikenal memiliki tradisi demokrasi yang kuat, yang tercermin dalam budaya lokal "Mapalus" sebagai bentuk gotong royong dan pengambilan keputusan bersama. Nilai-nilai ini turut memengaruhi cara pandang masyarakat setempat terhadap praktik pemilihan umum modern. Menurut Tampi (2020), masyarakat Minahasa memiliki tingkat partisipasi pemilih yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia, didorong oleh kesadaran komunal yang mengakar dalam tradisi adat. Namun demikian, dinamika politik kontemporer, polarisasi identitas, serta meningkatnya pengaruh media sosial telah menghadirkan tantangan baru bagi kualitas demokrasi di wilayah ini, khususnya dalam menjaga kejernihan opini publik menjelang dan selama pelaksanaan Pemilu 2024.

Dalam konteks nasional, Pemilu 2024 berlangsung di tengah berbagai isu krusial seperti ketimpangan ekonomi, polarisasi politik, dan kekhawatiran terhadap netralitas penyelenggara pemilu. Lembaga survei nasional mencatat bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi mengalami fluktuasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Mietzner, 2022). Di Minahasa, kondisi ini diperparah oleh dinamika politik lokal yang kerap diwarnai praktik politik uang serta mobilisasi berbasis ikatan kekerabatan dan kedaerahan. Novianto (2023) menegaskan bahwa pemahaman masyarakat terhadap integritas pemilu sangat dipengaruhi oleh pengalaman politik sebelumnya, tingkat pendidikan, serta akses terhadap informasi yang akurat dan berimbang, sehingga diperlukan kajian mendalam untuk memahami pandangan masyarakat Minahasa secara komprehensif dalam konteks Pemilu 2024.

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami partisipasi politik dan pandangan masyarakat terhadap pemilu di Indonesia. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Suwandi (2021) mengkaji tingkat partisipasi pemilih di wilayah Sulawesi Utara pada Pemilu 2019, dan menemukan bahwa faktor kepercayaan terhadap kandidat serta keterikatan afektif terhadap partai politik menjadi prediktor utama keputusan untuk memilih. Kedua, Warouw (2022) dalam studinya tentang perilaku pemilih di komunitas adat Minahasa menyimpulkan bahwa nilai-nilai kolektivisme lokal secara signifikan membentuk preferensi dan loyalitas politik warga, meski tekanan modernisasi mulai menggeser orientasi tersebut ke arah pertimbangan yang lebih rasional dan berbasis program. Ketiga, Pakasi (2020) meneliti pengaruh media sosial terhadap persepsi masyarakat Sulawesi Utara mengenai kandidat dalam pemilu legislatif, dan menyimpulkan bahwa eksposur informasi digital yang tidak tersaring justru meningkatkan polarisasi opini di kalangan pemilih muda di wilayah tersebut.

Selain ketiga penelitian di atas, kajian lain juga turut memberikan konteks yang relevan. Lumintang (2021) menyoroti peran tokoh adat dan pemimpin agama dalam memengaruhi pilihan politik masyarakat Minahasa, dan menemukan bahwa otoritas tradisional masih memegang pengaruh kuat dalam membentuk opini publik menjelang pemilu. Penelitian Rotinsulu (2022) mengenai persepsi pemilih perempuan di Minahasa terhadap keterwakilan politik menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih selektif dalam menilai integritas kandidat dibandingkan pemilih laki-laki. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut telah berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pemilih dan persepsi terhadap demokrasi di wilayah Minahasa, namun masih belum secara khusus mengkaji pandangan masyarakat Minahasa secara holistik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 sebagai sebuah fenomena politik yang bersifat kontemporer dan multidimensional.

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan dalam kajian mengenai pandangan masyarakat Minahasa terhadap pemilu demokrasi politik. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek partisipasi pemilih dan perilaku memilih secara kuantitatif, tanpa menggali secara mendalam bagaimana masyarakat Minahasa memaknai dan menilai kualitas penyelenggaraan demokrasi secara keseluruhan. Penelitian yang ada juga cenderung mengabaikan perspektif lintas generasi dan lintas latar belakang sosial-ekonomi, sehingga tidak mampu menangkap keragaman pandangan yang sesungguhnya ada di tengah masyarakat Minahasa yang bersifat plural dan dinamis (Wulandari, 2022). Selain itu, belum ada kajian yang secara spesifik mengintegrasikan variabel budaya lokal Minahasa dengan persepsi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 sebagai satu kesatuan analisis yang utuh.

Kesenjangan lain yang ditemukan adalah minimnya penelitian yang mengkaji pengaruh pengalaman pemilu sebelumnya terhadap pandangan masyarakat Minahasa dalam menghadapi Pemilu 2024. Padahal, memori kolektif terhadap praktik pemilu terdahulu, termasuk pengalaman dengan kecurangan, janji kampanye yang tidak ditepati, dan ketimpangan distribusi sumber daya politik, sangat berpengaruh terhadap pembentukan sikap skeptis atau optimis dalam menghadapi pemilu berikutnya (Aspinall dan Sukmajati, 2015). Selain itu, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis bagaimana konteks lokal Minahasa, termasuk faktor etnisitas, agama, dan identitas kedaerahan, berinteraksi dengan narasi politik nasional dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap Pemilu 2024. Kekosongan inilah yang menjadi justifikasi ilmiah bagi pelaksanaan penelitian ini.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan perspektif kultural Minahasa dengan analisis terhadap pandangan masyarakat mengenai demokrasi elektoral dalam konteks Pemilu 2024. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis survei, penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang memungkinkan penggalian makna dan pengalaman hidup informan secara lebih mendalam dan autentik. Sebagaimana ditekankan oleh Creswell (2018), pendekatan fenomenologi sangat relevan digunakan ketika peneliti ingin memahami esensi dari sebuah pengalaman kolektif yang kompleks, termasuk pengalaman berpolitik dalam masyarakat yang memiliki akar budaya yang kuat seperti masyarakat Minahasa. Dengan demikian, penelitian ini mampu menghadirkan perspektif baru yang tidak dapat diperoleh melalui metode konvensional yang telah banyak digunakan sebelumnya.

Selain aspek metodologis, kebaruan penelitian ini juga terletak pada fokus analisisnya yang mencakup pandangan masyarakat dari berbagai segmen sosial di Minahasa, termasuk tokoh adat, pemuda, perempuan, dan kelompok masyarakat sipil, dalam menyikapi Pemilu 2024 secara komprehensif. Penelitian ini juga merupakan yang pertama secara khusus mengkaji relasi antara identitas kultural Minahasa dan orientasi politik dalam konteks pemilu serentak 2024 yang memiliki kompleksitas tersendiri. Menurut Lijphart (2012), penelitian yang berfokus pada komunitas budaya tertentu dalam konteks pemilu demokratis memiliki nilai ilmiah yang tinggi karena mampu mengungkap dinamika mikro yang tidak terlihat dalam kajian berskala nasional. Dengan demikian, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis yang bermakna bagi pengembangan ilmu politik lokal sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi penyelenggara pemilu di Indonesia.

Realitas pelaksanaan Pemilu 2024 di wilayah Minahasa menunjukkan dinamika yang kompleks dan penuh nuansa. Berdasarkan data KPU Sulawesi Utara, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Minahasa pada Pemilu 2024 mencapai angka yang cukup tinggi, namun diiringi

oleh berbagai catatan kritis dari masyarakat terkait proses kampanye yang dinilai tidak bersih dari praktik politik transaksional. Fenomena serangan fajar dan distribusi bantuan sosial yang diduga bermuatan politis menjadi persoalan yang dirasakan nyata oleh sebagian warga, sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pengawas Pemilu setempat. Menurut Aspinall dan Sukmajati (2015), praktik politik uang di Indonesia bukan hanya masalah teknis penyelenggaraan pemilu, melainkan mencerminkan ketimpangan struktural dalam sistem demokrasi yang masih menempatkan hubungan klientelistik sebagai mekanisme utama mobilisasi suara, termasuk di daerah-daerah dengan identitas budaya yang kuat seperti Minahasa.

Di sisi lain, masyarakat Minahasa juga menunjukkan kapasitas kritis yang patut diapresiasi dalam merespons berbagai isu yang mewarnai Pemilu 2024, termasuk isu netralitas aparat, kebebasan berpendapat, dan keadilan dalam proses penghitungan suara. Sejumlah komunitas lokal dan kelompok pemuda aktif mengorganisir kegiatan pemantauan pemilu secara mandiri sebagai bentuk kontrol sipil terhadap jalannya demokrasi. Menurut Diamond (2019), vitalitas masyarakat sipil di tingkat lokal merupakan salah satu indikator paling reliabel dari kematangan demokrasi suatu bangsa, dan kehadiran elemen-elemen kritis semacam ini di Minahasa menunjukkan bahwa kesadaran demokratik masyarakat setempat masih terus berkembang meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan struktural. Kondisi inilah yang menjadikan kajian tentang pandangan masyarakat Minahasa terhadap Pemilu 2024 sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan demi memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pandangan masyarakat Minahasa terhadap pemilu demokrasi politik tahun 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap makna, persepsi, dan pengalaman subjektif informan yang tidak dapat ditangkap melalui angka atau statistik semata.

Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali secara lebih komprehensif bagaimana masyarakat Minahasa memaknai, menilai, dan merespons pelaksanaan pemilu 2024 dalam kehidupan sosial dan politik mereka sehari-hari. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung di lapangan.

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi sosial dan perilaku politik masyarakat Minahasa dalam konteks pemilu 2024, termasuk aktivitas kampanye, diskusi publik, dan interaksi antarwarga yang berkaitan dengan isu-isu elektoral. Menurut Sugiyono (2019), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki ciri spesifik dibandingkan teknik lainnya karena tidak hanya terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui pengamatan langsung ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang autentik mengenai suasana sosial-politik yang melingkupi masyarakat Minahasa selama periode penyelenggaraan Pemilu 2024, sekaligus menjadi dasar triangulasi data bersama teknik pengumpulan data lainnya.

Selain observasi, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara mendalam kepada informan yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap dinamika pemilu di wilayah Minahasa. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara fleksibel mengikuti alur pemikiran informan, namun tetap terarah pada fokus penelitian. Menurut Creswell (2018), wawancara dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam

karena informan diberikan kebebasan untuk mengekspresikan pandangan dan pengalamannya secara terbuka. Kombinasi antara observasi dan wawancara dalam penelitian ini dirancang untuk menghasilkan data yang saling melengkapi sehingga deskripsi dan analisis terhadap pandangan masyarakat Minahasa terhadap Pemilu 2024 dapat disajikan secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Pandangan Masyarakat Minahasa Terhadap Pelaksanaan Pemilu 2024

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, masyarakat Minahasa secara umum memiliki pandangan yang beragam terhadap pelaksanaan Pemilu 2024. Sebagian besar informan menyatakan bahwa pemilu merupakan sarana penting bagi rakyat untuk menentukan arah kepemimpinan negara dan daerah, sehingga keterlibatan aktif dalam setiap tahapan proses elektoral dipandang sebagai kewajiban moral sekaligus hak konstitusional yang harus ditunaikan.

Gambar 1. Bersama Ibu Linda Wurara



Sumber: Data Primer

Ibu Linda Wurara (45 tahun) menyatakan bahwa pandangan terhadap pemilu 2024 sangat positif karena masyarakat turut serta mengambil bagian dalam berbagai kegiatan rapat umum dan sosialisasi pemilu yang diselenggarakan di wilayah mereka. Menurut Budiardjo (2021), partisipasi warga dalam setiap tahapan pemilu merupakan indikator utama dari kualitas demokrasi suatu bangsa, dan antusiasme yang ditunjukkan masyarakat Minahasa mencerminkan kesadaran politik yang relatif matang di tingkat lokal.

Pandangan masyarakat Minahasa terhadap Pemilu 2024 juga dipengaruhi oleh pengalaman politik mereka pada pemilu-pemilu sebelumnya. Warga yang telah melewati beberapa kali siklus pemilu cenderung memiliki perspektif yang lebih kritis dan selektif dalam menilai kandidat maupun proses penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Bapak Nobert Tampemawa (63 tahun) menegaskan bahwa harapan terbesar masyarakat terhadap Pemilu 2024 adalah terselenggaranya proses yang jujur dan adil, serta kepercayaan penuh kepada KPU sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan berbagai persoalan teknis dan sengketa yang muncul selama proses pemilu berlangsung. Aspinall dan Sukmajati (2015) menjelaskan bahwa memori kolektif masyarakat terhadap pengalaman pemilu sebelumnya sangat berpengaruh dalam membentuk ekspektasi dan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu pada periode berikutnya.

Secara keseluruhan, pandangan masyarakat Minahasa terhadap Pemilu 2024 mencerminkan dualisme antara optimisme dan kewaspadaan. Di satu sisi, masyarakat menyambut pemilu sebagai peluang nyata untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan di daerah mereka. Di sisi lain, mereka juga menyadari bahwa proses

demokrasi masih rentan terhadap berbagai praktik yang tidak sehat, seperti politik uang, manipulasi informasi, dan mobilisasi berbasis ikatan primordial. Novianto (2023) menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi sangat ditentukan oleh konsistensi penyelenggara dalam menegakkan prinsip kejujuran dan keadilan, dan ketika prinsip tersebut dijalankan dengan sungguh-sungguh, masyarakat akan lebih mudah menerima hasil pemilu dan mempertahankan stabilitas sosial pasca pemilu.

b. Dampak Sosial Pemilu 2024 Terhadap Kehidupan Masyarakat Minahasa

Pemilu 2024 membawa dampak sosial yang signifikan terhadap dinamika kehidupan masyarakat Minahasa, terutama dalam hal hubungan antarwarga dan kohesi sosial di tingkat komunitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pilihan politik seringkali memicu ketegangan sosial yang merembes hingga ke dalam hubungan keluarga dan pertemanan yang sebelumnya terjalin dengan harmonis.

Gambar 2. Bersama Ibu Berty Lumuko



Sumber: Data Primer

Ibu Berty Lumuko (61 tahun) secara tegas menyampaikan keprihatinannya atas fenomena di mana anggota keluarga yang berbeda pilihan partai tidak lagi saling menyapa, sebuah realitas sosial yang mencerminkan betapa dalamnya polarisasi politik telah merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat di Minahasa. Menurut Mietzner (2022), intensifikasi persaingan partai politik di Indonesia telah melahirkan fragmentasi sosial yang tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga menyentuh lapisan komunitas paling kecil di tingkat lokal.

Selain polarisasi, penelitian ini juga menemukan bahwa Pemilu 2024 memunculkan dinamika baru dalam relasi sosial masyarakat Minahasa yang berkaitan dengan penyebaran informasi dan disinformasi melalui media sosial. Banyak warga yang mengaku menerima berbagai informasi yang saling bertentangan mengenai kandidat dan proses pemilu melalui platform digital, sehingga menimbulkan kebingungan dan kecemasan di kalangan pemilih. Pakasi (2020) menemukan bahwa eksposur informasi digital yang tidak tersaring di kalangan masyarakat Sulawesi Utara justru memperparah polarisasi opini dan mempersulit masyarakat dalam membuat keputusan politik yang rasional dan berbasis informasi yang akurat. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan literasi digital di kalangan masyarakat Minahasa agar mereka mampu memilah informasi dengan bijak dan tidak mudah terprovokasi oleh konten-konten yang berpotensi memecah belah persatuan.

Meski diwarnai oleh berbagai tantangan sosial, masyarakat Minahasa terbukti masih memiliki modal sosial yang cukup kuat untuk melewati periode pemilu dengan tetap menjaga

kerukunan antarwarga. Nilai-nilai kearifan lokal seperti Mapalus dan semangat gotong royong menjadi penyangga sosial yang efektif dalam meredam potensi konflik yang dapat ditimbulkan oleh perbedaan pilihan politik. Lumintang (2021) menegaskan bahwa peran tokoh adat dan pemimpin agama di Minahasa sangat strategis dalam menjaga keseimbangan sosial selama periode pemilu, karena otoritas moral mereka diakui oleh masyarakat lintas afiliasi politik dan mampu menjadi jembatan rekonsiliasi ketika ketegangan sosial mulai memuncak. Dengan demikian, kearifan lokal masyarakat Minahasa terbukti bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai mekanisme adaptif yang fungsional dalam menghadapi tekanan sosial-politik yang ditimbulkan oleh dinamika pemilu.

c. Harapan dan Aspirasi Masyarakat Minahasa Terhadap Demokrasi Politik ke Depan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Minahasa menyimpan harapan yang besar terhadap perbaikan kualitas demokrasi politik di masa mendatang, khususnya dalam hal integritas penyelenggaraan pemilu dan akuntabilitas para pemimpin yang terpilih. Harapan utama yang paling banyak dikemukakan oleh informan adalah terwujudnya pemilu yang benar-benar jujur dan adil, bebas dari praktik politik uang, intimidasi, dan berbagai bentuk kecurangan yang masih dirasakan sebagai persoalan nyata oleh masyarakat.

Bapak Nobert Tampemawa (63 tahun) mengungkapkan harapannya agar KPU dan seluruh aparaturnya penyelenggara pemilu dapat bekerja dengan penuh integritas dan profesionalisme, sehingga hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Menurut Diamond (2019), kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu merupakan prasyarat utama bagi konsolidasi demokrasi yang berkelanjutan, dan harapan masyarakat Minahasa ini mencerminkan kedewasaan politik yang patut diapresiasi.

Selain integritas penyelenggaraan, masyarakat Minahasa juga mengaspirasi pemimpin-pemimpin yang terpilih melalui Pemilu 2024 untuk sungguh-sungguh mengemban amanah rakyat dengan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok dan golongan.

Gambar 3. Bersama Bapak Nobert Tampemawa



Sumber: Data Primer

Warga menekankan pentingnya komitmen para pemimpin terpilih untuk mewujudkan janji-janji kampanye yang telah disampaikan, mengingat pengalaman sebelumnya di mana banyak janji kampanye yang tidak terealisasi setelah pemilu usai. Rotinsulu (2022) menemukan bahwa masyarakat Minahasa, khususnya pemilih perempuan, memiliki standar penilaian yang tinggi terhadap integritas dan konsistensi kandidat antara ucapan dan tindakan nyata, sehingga rekam jejak dan komitmen program menjadi

pertimbangan utama dalam menentukan pilihan politik mereka. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemilih Minahasa semakin bergerak ke arah pemilih yang rasional dan kritis, yang mengedepankan substansi program di atas sekadar pencitraan dan popularitas semata.

Pada akhirnya, aspirasi masyarakat Minahasa terhadap demokrasi politik ke depan dapat diringkas sebagai keinginan untuk melihat sistem demokrasi yang tidak hanya prosedural tetapi juga substantif, di mana setiap suara rakyat benar-benar dihormati dan setiap kebijakan yang dihasilkan oleh pemimpin terpilih sungguh-sungguh berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas. Masyarakat berharap agar polarisasi politik yang terjadi selama Pemilu 2024 dapat segera mereda dan semua elemen masyarakat kembali bersatu dalam semangat kebersamaan membangun daerah. Warouw (2022) menyatakan bahwa nilai-nilai kolektivisme dalam budaya Minahasa sesungguhnya mengandung potensi besar untuk mentransformasi politik lokal menjadi lebih deliberatif dan berorientasi pada kepentingan bersama, apabila nilai-nilai tersebut secara konsisten dijadikan sebagai landasan etik dalam praktik politik sehari-hari. Dengan demikian, harapan masyarakat Minahasa bukan sekadar impian, melainkan sebuah visi demokratis yang berakar kuat pada kearifan lokal dan kesadaran kolektif yang terus berkembang.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Minahasa memiliki pandangan yang beragam namun secara umum positif terhadap pelaksanaan Pemilu 2024. Masyarakat memandang pemilu sebagai sarana penting untuk menentukan arah kepemimpinan dan masa depan daerah, yang tercermin dari tingginya antusiasme partisipasi warga dalam berbagai kegiatan sosialisasi dan rapat umum pemilu. Namun di sisi lain, pelaksanaan Pemilu 2024 juga membawa dampak sosial berupa polarisasi politik yang meresap hingga ke dalam hubungan keluarga dan komunitas, sebagaimana dirasakan oleh sebagian besar informan dalam penelitian ini. Nilai-nilai kearifan lokal Minahasa seperti Mapalus dan semangat gotong royong terbukti berperan penting sebagai penyangga sosial yang menjaga kerukunan masyarakat di tengah tekanan persaingan politik yang semakin intens selama periode penyelenggaraan pemilu.

Penelitian ini juga menemukan bahwa harapan terbesar masyarakat Minahasa terhadap demokrasi politik adalah terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari praktik politik transaksional. Kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU menjadi faktor kunci dalam menjaga legitimasi proses demokratis di mata masyarakat. Selain itu, masyarakat mengaspirasi pemimpin-pemimpin terpilih yang benar-benar berkomitmen menjalankan amanah rakyat dan merealisasikan janji-janji kampanye secara nyata. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Minahasa semakin berkembang menjadi pemilih yang kritis dan rasional, yang tidak hanya menilai kandidat dari popularitas semata tetapi juga dari integritas, rekam jejak, dan keseriusan program yang ditawarkan, sehingga penguatan pendidikan politik dan literasi demokrasi di wilayah Minahasa menjadi kebutuhan yang mendesak untuk terus didorong demi memperkuat kualitas demokrasi lokal secara berkelanjutan.

5. Daftar Pustaka

- Aspinall, E., dan Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov.
- Budiardjo, M. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Diamond, L. (2019). *Ill Winds: Saving Democracy from Russian Rage, Chinese Ambition, and American Complacency*. New York: Penguin Press.
- Hidayat, S., dan Suwandi, M. (2021). Partisipasi Pemilih dan Faktor Penentu Keputusan Memilih di Sulawesi Utara pada Pemilu 2019. *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, 6(2), 112–129.
- Lijphart, A. (2012). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries* (2nd ed.). New Haven: Yale University Press.
- Lumintang, R. (2021). Peran Tokoh Adat dan Pemimpin Agama dalam Memengaruhi Pilihan Politik Masyarakat Minahasa. *Jurnal Sosial Politik Sulawesi*, 4(1), 45–61.
- Mietzner, M. (2022). *Democracy in Indonesia: Between Stagnation and Crisis*. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Novianto, A. (2023). Persepsi Publik terhadap Integritas Pemilu dan Implikasinya bagi Legitimasi Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 11(1), 78–95.
- Pakasi, D. (2020). Pengaruh Media Sosial terhadap Persepsi Masyarakat Sulawesi Utara Mengenai Kandidat dalam Pemilu Legislatif. *Jurnal Komunikasi Politik*, 3(2), 88–104.
- Rotinsulu, C. (2022). Persepsi Pemilih Perempuan di Minahasa terhadap Keterwakilan Politik dalam Pemilu. *Jurnal Gender dan Politik Indonesia*, 5(1), 33–50.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tampi, B. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Minahasa dalam Perspektif Budaya Lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Sulawesi Utara*, 2(1), 19–36.
- Warouw, F. (2022). Perilaku Pemilih di Komunitas Adat Minahasa: Antara Kolektivisme dan Rasionalitas Politik. *Jurnal Politik Lokal Indonesia*, 7(2), 56–74.
- Wulandari, T. (2022). Keragaman Pandangan Politik Masyarakat Lokal dalam Konteks Demokrasi Elektoral Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 9(3), 101–118.